

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

Jl. Letjen Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

Telp. (0286) 592810

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara

Telp. (0286) 592810

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarnegara, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ALI IMRON, SH.

NIP. 196804051993031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
II. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	48
C.6. Ekuitas	49

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2.	Beban Pegawai	50
D.3.	Beban Persediaan	51
D.4.	Beban Jasa.....	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	53
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	54
D.8.	Kegiatan Non Operasional	54
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (defisit) LO	55
E.3.	Koreksi Aset Tetap	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.5.	Kenaikan / Penurunan Ekuitas	56
E.6.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	56
	Daftar dan Lampiran	60
	Rincian Nilai Perolehan Pengadilan Agama Banjarnegara.....	61
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.....	63

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
Telp. (0286) 592810 e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarnegara, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ALI IMRON, SH.

NIP. 196804051993031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 777,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.600.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp. 6.508.654.635,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.510.146.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.342.283.770,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 6.676.824,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 15.335.606.946,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 315.822,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 315.822,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 15.341.967.948,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 6.815.193.321,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 6.814.443.321,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0,- dan surplus (defisit) sebesar Rp. 777,- sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp. 6.814.442.544,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 15.481.846.634,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 6.814.442.544,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6.674.563.858,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 15.341.967.948,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	600.000	777	0	1.200.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		600.000	777	0	1.200.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.302.168.000	5.301.160.568	100	4.635.718.810
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.207.978.000	1.207.494.067	100	1.207.833.463
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	86.925.000
	Jumlah Belanja Negara		6.510.146.000	6.508.654.635	100	5.930.477.273

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Persediaan	C.1. 1.	6.676.824	6.332.550
Jumlah Aset Lancar		6.676.824	6.332.550
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	10.613.780.000	10.613.780.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.383.969.937	2.323.784.937
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.268.037.000	5.268.037.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	12.180.537	12.180.537
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(2.942.360.528)	(2.632.343.066)
Jumlah Aset Tetap		15.335.606.946	15.585.439.408
Aset Lainnya			
C.4			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	7.400.000	7.400.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(7.400.000)	(7.400.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		15.342.283.770	15.591.771.958
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	315.822	325.324
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5. 2.	0	750.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		315.822	1.075.324
Jumlah Kewajiban		315.822	1.075.324
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.6	15.341.967.948	15.424.016.840
Jumlah Ekuitas Dana		15.341.967.948	15.590.696.634
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		15.342.283.770	15.591.771.958

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

II. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	750.000	450.000
Jumlah Pendapatan		750.000	450.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	5.301.160.568	4.635.718.810
Beban Persediaan	D. 3	17.566.750	23.084.250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	696.694.133	714.500.079
Beban Pemeliharaan	D. 5	429.760.408	404.374.238
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	63.119.000	59.516.900
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	306.892.462	312.901.481
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		6.815.193.321	6.150.095.758
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6.814.443.321)	(6.149.645.758)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus /(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		777	0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	777	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(6.814.442.544)	(6.149.645.758)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(6.814.442.544)	(6.149.645.758)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	15.481.846.634	15.424.016.840
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(6.814.442.544)	(6.149.645.758)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		0	(2.816.471)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(2.816.471)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	6.674.563.858	6.319.142.023
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(139.878.686)	166.679.794
Ekuitas Akhir		15.341.967.948	15.590.696.634

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah **“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung”**

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan **misi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin
4. Terwujudnya aparaturnya Pengadilan Agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal dan tata laksana kepegawaian yang tertib.
5. Terwujudnya Peningkatan kualitas kerja dan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor barang inventaris milik negara.
7. Terwujudnya Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
8. Terwujudnya tata kelola tata persuratan dan keuangan yang efektif dan efisien yang mampu terlaksananya kegiatan operasional kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp (*nol rupiah*);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 0 (*nol rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2022 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh

penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2022.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
1.200.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 777,- atau mencapai 0,13 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 600.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarnegara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.200.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	777	0	0,13
4.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
5.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
6.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
Total Pendapatan		777	1.200.000	0,13

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 599.223,- atau 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembayaran sewa yang dilakukan oleh Penyewa.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.200.000	1.200.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	777	0	777	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
6.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		777	1.200.000	1.200.777	99,94

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 6.508.654.635,-

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.508.654.635,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100 % dari anggaran senilai Rp. 6.510.146.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

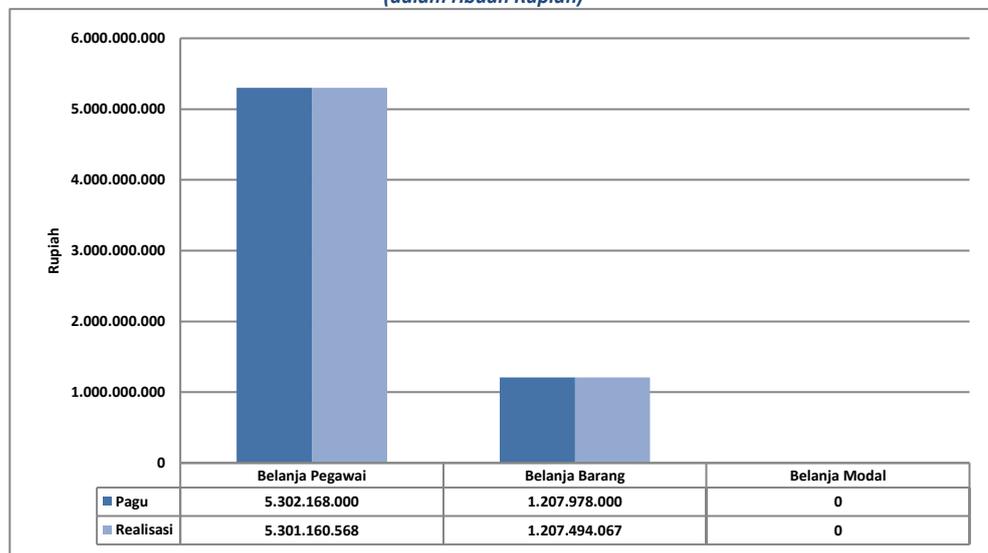
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.302.168.000	5.301.160.568	100
Belanja Barang	1.207.978.000	1.207.494.067	100
Belanja Modal	0	0	100
Total Belanja Bruto	6.510.146.000	6.508.654.635	100
Pengembalian Belanja	0	0	0

Total Belanja Netto	6.510.146.000	6.508.654.635	100
---------------------	---------------	---------------	-----

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 578.177.362,- atau sebesar 8,88 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan PAGU anggaran tahun 2023,;

Perbandingan realisasi belanja Semester II TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	5.301.160.568	4.635.718.810	665.441.758	12,55%
Belanja Barang	1.207.494.067	1.207.833.463	(339.396)	(0,03%)
Belanja Modal	0	86.925.000	(86.925.000)	(100,00%)
Total Belanja	6.508.654.635	5.930.477.273	578.177.362	8,88%

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
5.301.160.568*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 5.301.160.568,- dan Rp. 4.635.718.810,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,55 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022. Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah pegawai khususnya Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.666.471.460	1.574.983.260	91.488.200	5,49%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.313	20.661	(348)	1,68%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	136.001.732	117.180.546	18.821.186	13,84%
Belanja Tunj. Anak PNS	31.973.128	21.133.316	10.839.812	33,90%
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000	38.700.000	1.620.000	4,02%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.702.475.000	2.244.780.000	457.695.000	16,94%
Belanja Tunj. PPh PNS	393.822.039	324.685.213	69.136.826	17,56%
Belanja Tunj. Beras PNS	79.155.060	69.161.100	9.993.960	12,63%
Belanja Uang Makan PNS	238.112.000	232.250.000	5.862.000	2,46%
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.810.000	13.195.000	-385.000	2,92%
Total Belanja Brutto	5.301.160.732	4.636.089.096	665.071.636	12,55%
Pengembalian Belanja	164	370.286	(370.122)	99,96%
Total Belanja Netto	5.301.160.568	4.635.718.810	665.441.758	12,55%

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.207.494.067*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.207.494.067,- dan Rp. 1.207.943.463,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,04 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan PAGU Anggaran pada Tahun 2023.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Persediaan	24.998.624	28.239.650	(3.241.026)	11,48%
Belanja Barang dan Jasa	572.415.764	536.023.050	36.392.714	6,36%
Belanja Barang dan Jasa Non Operasional	6.984.625	4.649.700	2.334.925	33,43%
Belanja Pemeliharaan	422.672.808	398.788.388	23.884.420	5,65%
Belanja Perjalanan Dinas	63.119.000	59.626.900	3.492.100	5,53%
Belanja Langganan Daya dan Jasa	117.303.246	180.615.775	(63.312.529)	35,05%
Total Belanja Brutto	1.207.494.067	1.207.943.463	(449.396)	0,04%
Pengembalian Belanja	0	110.000	(110.000)	100,00%
Total Belanja Netto	1.207.494.067	1.207.833.463	(339.396)	0,03%

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp. 0,-*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 86.925.000,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada alokasi pagu belanja modal TA 2023 di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	57.000.000	(57.000.000)	100,00 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	29.925.000	(29.925.000)	100,00 %
Total Belanja Brutto	0	86.925.000	(86.925.000)	100,00 %
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	86.925.000	(86.925.000)	100,00 %

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp. 6.676.824*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.676.824,- dan Rp. 6.332.550,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	6.676.824	6.332.550
Persediaan Belum diregister	0	0
Total Aset Lancar	6.676.824	6.332.550

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 20212
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp. 6.676.824

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. Rp. 6.676.824,- dan Rp. 6.332.550,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	5.994.874	5.317.400	6.763.000
2	Amunisi	0	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	681.950	1.015.150	0
4	Suku Cadang	0	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
7	Bahan Baku	0	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0	0
Total		6.676.824	6.332.550	6.763.000

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap:
Rp.
15.335.606.946

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp. 15.335.606.946,- dan Rp. 15.585.439.408,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
1	Tanah	10.613.780.000	10.613.780.000	-
2	Peralatan dan Mesin	2.383.969.937	2.323.784.937	60.185.000
3	Gedung dan Bangunan	5.268.037.000	5.268.037.000	-
5	Aset Tetap Lainnya	12.180.537	12.180.537	-
	Jumlah	18.277.967.474	18.217.782.474	60.185.000
	Akumulasi Penyusutan	(2.942.360.528)	(2.632.343.066)	(310.017.462)
	Nilai Buku Aset Tetap	15.335.606.946	15.585.439.408	(249.832.462)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
10.613.780.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.613.780.000,- dan Rp. 10.613.780.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	3.000	11.28.06.19.4 .00016	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarnegara	9.733.050.000
2.	2	496	005	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarnegara	675.701.000
3.	1	180	11.28.06.12.4 .00011	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarnegara	205.029.000
Jumlah						10.613.780.000

Tidak terdapat Perubahan Pada Nilai Aset Tanah Pengadilan Agama Banjarnegara.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2.383.969.937*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.383.969.937 dan Rp. 2.323.784.937.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	2.199.384.937
Mutasi Tambah	184.585.000
Pembelian	6.984.625
Transfer Masuk	124.400.000
Saldo per 31 Desember 2023	2.383.969.937
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(2.033.499.728)
Nilai Buku 31 Desember 2022	350.470.209

Mutasi tambah Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp. 184.585.000,- yang berasal dari pengadaan belanja modal peralatan dan mesin, transfer masuk aset dari BUA Mahkamah Agung RI.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
5.268.037.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.268.037.000,- dan Rp. 5.268.037.000.-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	5.268.037.000
Mutasi Tambah	968.786.000
Reklasifikasi Masuk	968.786.000
Mutasi Kurang	(968.786.000)
Reklasifikasi Keluar	(968.786.000)
Koreksi Pencatatan	(968.786.000)
Saldo per 31 Desember 2023	5.268.037.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(908.860.800)
Nilai Buku 31 Desember 2022	4.359.176.200

Terdapat mutasi baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset gedung dan bangunan sebesar akumulasi total Rp. 968.786.000 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan dan koreksi atas pencatatan penambahan nilai aset gedung dan bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
12.180.537*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.180.537 dan Rp. 12.180.537.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	12.180.537
Mutasi Tambah	

Monografi	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	12.180.537
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	12.180.537

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(2.942.360.528,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. (2.942.360.528,-) dan Rp. (2.632.343.066,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.613.780.000	0	10.613.780.000
2	Peralatan dan Mesin	2.383.969.937	2.033.499.728	350.470.209
3	Gedung dan Bangunan	5.268.037.000	908.860.800	4.359.176.200
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	0
5	Konstruksi alam Pekerjaan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	12.180.537	0	12.180.537
	Jumlah	18.277.967.474	2.942.360.528	15.335.606.946

Aset Lainnya:
Rp. 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	7.400.000	7.400.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	7.400.000	7.400.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.400.000)	(7.400.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

Mutasi nilai Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	7.400.000
Mutasi Tambah	
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	7.400.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(7.400.000)
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp. 7.400.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 7.400.000 dan Rp. 7.400.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Anti Virus	4.900.000
2.	Windows Server	2.500.000
Jumlah Total		7.400.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banjarnegara berupa software dan anti virus yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 315.822*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 315.822 dan Rp. 1.075.324. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Pendapatan diterima di muka	0	750.000
Utang Kepada Pihak Ketiga	315.822	325.324
Jumlah	315.822	1.075.324

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 315.822*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 315.822 dan Rp. 325.324. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Banjarnegara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Hutang Kepada Pihak Ketiga	315.822	
	Jumlah	315.822	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.
15.590.696.634*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.342.283.770 dan Rp. 15.590.696.634. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2023 terdapat penurunan nilai kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. (140.638.188) atau (0,91) persen dari nilai per 31 Desember 2022. Jumlah nilai Kewajiban

dan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 15.342.283.770, sedangkan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 15.590.696.634.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
Pnbp : Rp. 777*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 450.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	600.000	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	777	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
6.	Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
Total Pendapatan		600.000	777	0,13

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
5.301.160.568*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.301.160.568 dan Rp. 4.635.718.810. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.666.471.460	1.574.983.260	91.488.200	5,49%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-164	-286	122	-74,39%
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.149	20.661	-512	-2,54%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	136.001.732	117.180.546	18.821.186	13,84%
Beban Tunj. Anak PNS	31.973.128	21.133.316	10.839.812	33,90%
Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000	38.700.000	1.620.000	4,02%
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.702.475.000	2.244.780.000	457.695.000	16,94%
Beban Tunj. PPh PNS	393.822.039	324.685.213	69.136.826	17,56%
Beban Tunj. Beras PNS	79.155.060	69.161.100	9.993.960	12,63%
Beban Uang Makan PNS	238.112.000	232.250.000	5.862.000	2,46%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	-370.000	370.000	0,00%
Beban Tunjangan Umum PNS	12.810.000	13.195.000	-385.000	2,92%
Total Beban Pegawai	5.301.160.404	4.635.718.810	665.441.594	12,55%

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 17.566.750*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.566.750 dan Rp. 23.084.250. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan	17.566.750	23.084.250	(5.517.500)	23,90%
Konsumsi				
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	17.566.750	23.084.250	(5.517.500)	23,90%

D.4. Beban Jasa

Beban Jasa :
Rp.
696.694.133.

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 696.694.133 dan Rp 714.500.079. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	471.452.664	445.461.600	25.991.064	5,51%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	599.600	1.799.250	(1.199.650)	66,68%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80.004.000	49.800.000	30.204.000	37,75%
Beban Barang Operasional Lainnya	20.359.500	38.962.200	(18.602.700)	47,75%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.984.625	4.649.700	2.334.925	33,43%
Beban Langganan Listrik	0	78.180.053	(78.180.053)	100,00%
Beban Langganan Telepon	2.213.174	2.335.736	(122.562)	5,25%
Beban Langganan Air	1.707.380	1.549.640	157.740	9,24%
Beban Sewa	113.373.190	86.641.900	26.731.290	23,58%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5.120.000	(5.120.000)	100,00%
Total Beban Jasa	696.694.133	714.500.079	(17.805.946)	2,49%

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.
429.760.408*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 429.760.408,- dan Rp. 404.374.238,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan	281.986.000	253.939.250	28.046.750	9,95%
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan	6.737.336	2.025.000	4.712.336	69,94%
Lainnya				
Beban Pemeliharaan				
Peralatan dan Mesin	133.949.472	142.824.138	(8.874.666)	6,21%
Beban Persediaan bahan				
untuk pemeliharaan	7.087.600	5.585.850	1.501.750	21,19%
Total Beban Pemeliharaan	429.760.408	404.374.238	25.386.170	5,91%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
63.119.000.*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.119.000 dan Rp 59.516.900. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	59.819.000	56.326.900	3.492.100	5,84%
Pengembalian Beban				
Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-110.000	(110.000)	100,00%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.300.000	3.300.000	0	0,00%
Total Beban Perjalanan Dinas	63.119.000	59.516.900	3.602.100	5,71%

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
306.892.462*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 306.892.462 dan Rp. 312.901.481. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	155.415.661	161.424.680	(6.009.019)	3,72%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	151.476.801	151.476.801	0	0,00%
Jumlah Penyusutan	306.892.462	312.901.481	(6.009.019)	1,92%
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0,00%
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00%
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0,00%
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	306.892.462	312.901.481	(6.009.019)	1,92%

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus (defisit)
Kegiatan Non
Operasional :
Rp. 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	-	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	(777)	0	777	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	0	-	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-	0,00
Pendapatan pelunasan Piutang Non bendahara	0	0	-	0,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-	0,00
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(777)	0	777	100,00

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 15.481.846.634 dan Rp. 15.424.016.840.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp. 6.814.442.544) dan (Rp. 6.149.645.758). Defisit LO merupakan

selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp. 0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. (2.816.471). Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai aset non revaluasi.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas : Rp.
6.674.563.858*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.674.563.858 dan Rp. 6.319.142.023.

E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

*Kenaikan /
Penurunan
Ekuitas : Rp.
(139.878.686)*

Kenaikan / Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (139.878.686) dan Rp. 166.679.794.

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.
15.341.967.948*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.341.967.948 dan Rp. 15.590.696.634.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang perlu ditindaklanjuti.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat Pendapatan dan Belanja Secara Akrual di Pengadilan Agama Banjarnegara pada Semester II Tahun Anggaran 2023, yaitu Sewa dibayar dimuka untuk sewa atas sebagian tanah yang dijadikan untuk kantin dengan nominal sebesar Rp. 750.000,-

F.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada Semester II Tahun Anggaran 2023 terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp. 0.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

- 1) BRI KC Jakarta Veteran A/C 653254011061000 a.n. BPG PA BANJARNEGARA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.
- 2) BRI A/C 651544011071000 a.n. BPG 164 PA Banjarnegara 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA DIRJEN BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.
- 3) Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarnegara A/C 18 000 000 48 a.n. RPL 164 PA Banjarnegara Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 91.931.000,-.

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi 1 Tanggal 11 April 2023
2. Revisi 2 Tanggal 17 Juli 2023
3. Revisi 3 Tanggal 23 Oktober 2023
4. Revisi 4 Tanggal 27 November 2023
5. Revisi 5 Tanggal 18 Desember 2023
6. Revisi 6 Tanggal 21 Desember 2023

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB di Pengadilan Agama Banjarnegara pada Semester II TA 2023.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Banjarnegara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	465	2.383.969.937	2.033.499.728	350.470.209
1.	ELECTRIC GENERATING SET	1,	99.449.850,	(99.449.850,)	0,
2.	PERALATAN SAR MOUNTENERING	1,	2.500.000,	(535.714,)	1.964.286,
3.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	3,	315.333.234,	(315.333.234,)	0,
4.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5,	69.555.000,	(69.555.000,)	0,
5.	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	1,	19.250.000,	(19.250.000,)	0,
6.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	30,	98.587.000,	(96.487.000,)	2.100.000,
7.	ALAT KANTOR LAINNYA	15,	16.955.000,	(16.955.000,)	0,
8.	MEUBELAIR	212,	365.225.000,	(361.690.000,)	3.535.000,
9.	ALAT PENGUKUR WAKTU	9,	446.000,	(446.000,)	0,
10.	ALAT PENDINGIN	19,	100.882.084,	(100.882.084,)	0,
11.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	29,	78.193.034,	(47.468.900,)	30.724.134,
12.	PERALATAN STUDIO AUDIO	9,	51.931.020,	(38.654.806,)	13.276.214,
13.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2,	36.163.800,	(10.849.140,)	25.314.660,
14.	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	1,	26.000,	(26.000,)	0,
15.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3,	1.010.000,	(1.010.000,)	0,
16.	ALAT-ALAT SANDI	1,	6.000.000,	(6.000.000,)	0,
17.	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1,	2.800.000,	(840.000,)	1.960.000,
18.	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	1,	2.400.000,	(720.000,)	1.680.000,
19.	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	4,	4.250.000,	(1.275.000,)	2.975.000,
20.	KOMPUTER JARINGAN	2,	45.230.000,	(38.382.500,)	6.847.500,
21.	PERSONAL KOMPUTER	63,	788.941.615,	(611.598.200,)	177.343.415,
22.	PERALATAN MAINFRAME	1,	1.100.000,	(1.100.000,)	0,

23.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	48,	150.731.050,	(120.918.550,)	29.812.500,
24.	PERALATAN JARINGAN	3,	126.722.250,	(73.784.750,)	52.937.500,
25.	PERALATAN PERMAINAN	1,	288.000,	(288.000,)	0,
B.	Gedung dan Bangunan	6	5.268.037.000	757.383.999	(151.476.801,)
1.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	2	4.233.820.000	554.334.677	(43.172.686,)
2.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1	65.431.000	10.223.590	(2.044.718,)
3.	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	2	407.287.000	192.825.732	95.076.852,
4.	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1	200.463.000	0	(133.641.999,)
5.	PAGAR	1	361.036.000	0	(67.694.250,)
C.	Tanah	3.855	10.613.780.000	0	10.613.780.000
1.	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	855	880.730.000	0	880.730.000
2.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	3.000	9.733.050.000	0	9.733.050.000
D.	Aset Tetap Lainnya	91	12.180.537	0	12.180.537
1.	BUKU	91	12.180.537	0	12.180.537
E.	Software	2	7.400.000	7.400.000	0
1.	ASET TAK BERWUJUD	2	7.400.000	7.400.000	0
JUMLAH			18.277.967.474	2.942.360.528	15.335.606.946

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA 401106

Tgl Data : 29/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 8:59 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,510,146,000	6,508,654,635	(1,491,365)	100	5,935,140,000	5,930,477,273	(4,662,727)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BanjarNEGARA, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

ALI MRON
196804051993031002



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (401106) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 10:20 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	6,676,824	6,332,550	344,274	5.44
JUMLAH ASET LANCAR	6,676,824	6,332,550	344,274	5.44
ASET TETAP				
Tanah	10,613,780,000	10,613,780,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,383,969,937	2,199,384,937	184,585,000	8.39
Gedung dan Bangunan	5,268,037,000	5,268,037,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	12,180,537	12,180,537	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,942,360,528)	(2,616,793,066)	(325,567,462)	12.44
JUMLAH ASET TETAP	15,335,606,946	15,476,589,408	(140,982,462)	(0.91)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	7,400,000	7,400,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,400,000)	(7,400,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	15,342,283,770	15,482,921,958	(140,638,188)	(0.91)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	315,822	325,324	(9,502)	(2.92)
Pendapatan Diterima Dimuka	0	750,000	(750,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	315,822	1,075,324	(759,502)	(70.63)
JUMLAH KEWAJIBAN	315,822	1,075,324	(759,502)	(70.63)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,341,967,948	15,481,846,634	(139,878,686)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	15,341,967,948	15,481,846,634	(139,878,686)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	15,341,967,948	15,481,846,634	(139,878,686)	(0.90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,342,283,770	15,482,921,958	(140,638,188)	(0.91)

Keterangan :

FINAL



Banjarnegara, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

ALI MRON
196804051993031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (401106) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 10:25 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	750,000	450,000	300,000	66.667
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	750,000	450,000	300,000	66.667
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	750,000	450,000	300,000	66.667
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,301,160,568	4,635,718,810	665,441,758	14.355
Beban Persediaan	17,566,750	23,084,250	(5,517,500)	(23.902)
Beban Barang dan Jasa	696,694,133	714,500,079	(17,805,946)	(2.492)
Beban Pemeliharaan	429,760,408	404,374,238	25,386,170	6.278
Beban Perjalanan Dinas	63,119,000	59,516,900	3,602,100	6.052
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (401106) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 10:25 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	306,892,462	312,901,481	(6,009,019)	(1.92)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,815,193,321	6,150,095,758	665,097,563	10.814
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,814,443,321)	(6,149,645,758)	(664,797,563)	10.81
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	777	0	777	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	777	0	777	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	777	0	777	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,814,442,544)	(6,149,645,758)	(664,796,786)	10.81
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,814,442,544)	(6,149,645,758)	(664,796,786)	10.81

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI MIRON

196804051993031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (401106) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 10:29 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	15,481,846,634	15,424,016,840	57,829,794	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,814,442,544)	(6,149,645,758)	(664,796,786)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(2,816,471)	2,816,471	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(2,816,471)	2,816,471	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,674,563,858	6,210,292,023	464,271,835	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(139,878,686)	57,829,794	(197,708,480)	-
EKUITAS AKHIR	15,341,967,948	15,481,846,634	(139,878,686)	-

Keterangan :

FINAL

Banjarnegara, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ALI MIRON

196804051993031002

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TA 2023

Kode dan Nama UAKPA : (005.04.0300.401106) PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
 Kode dan Nama UAPPAW : (005.04.0300.402965) PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
 Kode dan Nama E1 : (005.04) DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
------------------	------------	------------

Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A

Untuk tanda bintang kurung (*) agar dicoret yang tidak perlu

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA face per 31 Desember 2023	√		Ada
3. Neraca per 31 Desember 2023	√		Ada
4. Laporan Operasional per 31 Desember 2023	√		Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023	√		Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada

Lampiran Pendukung LK (Cetakan Aplikasi Sakti Satker yg Wajib. Bisa Softcopy Pdf)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2023	√		Ada
2. Neraca Percobaan Awal Tahun Anggaran Berjalan	√		Ada
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan KPPN/e-Rekon-LK	√		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna	√		Ada
6. Berita Acara Stock-Opname Persediaan Semester II TA 2023	√		Ada

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	√		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK

Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Awal dari Sakti 2023 sama dengan Neraca Percobaan Awal dari Aplikasi e-Rekon-LK?	√		Sama
Jika tidak sama, harap dikoordinasikan dengan level K/L.			
Kesesuaian Saldo 31 Desember 2023	Sama	Tidak	Seharusnya
Apakah seluruh akun Neraca Percobaan bulan Juni dari Sakti 2023 sama dengan Neraca Percobaan bulan Juni 2023 dari Aplikasi e-Rekon-LK?	√		Sama

Jika tidak sama, kemungkinan karena data yang diupload ke E-rekon bukan data yang terbaru

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) <i>(kec. Penyisihan dan Akumulasi)</i>	√		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) <i>(kec. Pengembalian Pendapatan)</i>			Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>			Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI, POLRI dan Kemenlu</i>		√	Tidak
2. Adakah akun 41xxx (Pendapatan Perpajakan)		√	Tidak
3. Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) <i>Cat: seharusnya 423221</i>		√	Tidak
4. Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)		√	Tidak
5. Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)		√	Tidak
6. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)		√	Tidak
7. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)		√	Tidak
8. Adakah akun 423999 (Pendapatan anggaran lain-lain)		√	Tidak
Bila ada, seharusnya diralat ke akun 423951/423952/423953 (tergantung jenis belanja TAYL yang dikembalikan)			
9. Adakah akun 43xxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
10. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)		√	Tidak
akun 219671 hanya boleh muncul di laporan keuangan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan			
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa?		√	Ya/tidak
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
2. 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa</i>			Ya
3. Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?			Ya
Jika 111827 lebih kecil dari 218211, selisih tersebut agar dipastikan sama dengan nilai hibah langsung dalam bentuk barang/jasa.			
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada transfer masuk (TM) ?		√	Ya/tidak
Jika ya, apakah sudah diungkapkan nama satker pengirim dan nilainya di dalam CALK?			
Sebutkan			
2. Apakah mungkin ada transfer keluar (TK) ?		√	Ya/tidak
Jika ya, apakah sudah diungkapkan nama satker penerima dan nilainya di dalam CALK?			
Sebutkan			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/tidak
2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya

3. Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN?			Ya																							
LAPORAN OPERASIONAL																										
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya																							
1. Adakah pendapatan Perpajakan		√	Tidak																							
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak																							
3. Adakah beban bunga		√	Tidak																							
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak																							
5. Adakah beban hibah		√	Tidak																							
6. Adakah beban transfer		√	Tidak																							
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak																							
Pengecekan saldo tidak ada di referensi	Ada	Tidak	Seharusnya																							
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak																							
Pengecekan saldo Normal	Ya	Tidak	Seharusnya																							
1. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	√		Ya																							
2. Apakah seluruh akun beban penyisihan piutang bernilai positif?			Ya/Tidak																							
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>																										
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya																							
Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Penghapusan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="3">Contoh</th> </tr> <tr> <th>Beban Positif</th> <th>Beban Negatif</th> <th>Beban Negatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo akhir penyisihan piutang</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Saldo awal penyisihan piutang (-)</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Saldo penghapusan piutang (-)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Beban penyisihan Piutang di LO =</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-20</td> </tr> </tbody> </table>				URAIAN	Contoh			Beban Positif	Beban Negatif	Beban Negatif	Saldo akhir penyisihan piutang	30	20	20	Saldo awal penyisihan piutang (-)	20	30	30	Saldo penghapusan piutang (-)	0	0	10	Beban penyisihan Piutang di LO =	10	-10	-20
URAIAN	Contoh																									
	Beban Positif	Beban Negatif	Beban Negatif																							
Saldo akhir penyisihan piutang	30	20	20																							
Saldo awal penyisihan piutang (-)	20	30	30																							
Saldo penghapusan piutang (-)	0	0	10																							
Beban penyisihan Piutang di LO =	10	-10	-20																							
Pengecekan Antar Laporan	Ya	Tidak	Seharusnya																							
12. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak																							
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?			Ya																							
<i>Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Materi), atau pembelian tahun lalu yang penyerahannya tahun berjalan.</i>																										
13. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak																							
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?			Ya																							
<i>Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kodekelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahannya tahun berjalan.</i>																										
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS																										
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya																							
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"	√		Ada																							
Bila tidak ada, apakah wajar?																										
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?		√	Tidak																							
<i>Bila ada, maka :</i>																										
1 <i>Pastikan didukung dengan Surat Keputusan Penilaian dari KPKNL setempat/DJKN</i>																										
2 <i>Pastikan berasal dari Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK</i>																										
Pengecekan akun Transaksi Antar Entitas	Ada	Tidak	Seharusnya																							

1. Adakah akun Diterima dari Entitas Lain (313121) atau akun Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) dari Jurnal penyesuaian/Jurnal Umum?		√	Tidak
---	--	---	-------

NERACA

Pengecekan Pos Neraca	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Sama
2. Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon=LPJ (silabi)	√		Sama
3. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon=LPJ (silabi)	√		Sama
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan			
4. Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon=LPJ (silabi)	√		Sama
Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas lainnya di KL dari hibah belum disahkan			

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada
- Beban Persediaan/ Beban yang d (di LO)	√		Ada
Bila ada persediaan tetapi tidak ada beban persediaan pastikan tidak ada pemakaian barang persediaan atau tidak ada penyerahan barang ke masyarakat			
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)		√	Ada
Bila ada persediaan tetapi tidak ada nilai Penyesuaian Nilai Aset kemungkinan tidak ada perubahan harga di dalam satu tahun anggaran atau pengadaan hanya dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran			
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
5. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)		√	Ada/Tidak
Bila ada pendapatan sewa tetapi tidak ada pendapatan diterima di muka pastikan tidak ada penyewaan aset yang melebihi satu tahun anggaran			
6. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)		√	Ada/Tidak
Bila ada belanja sewa tetapi tidak ada belanja barang dibayar di muka pastikan tidak ada belanja sewa yang keperuntukannya melebihi satu tahun anggaran			
7. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)		√	Ada
Belanja barang yang masih harus dibayar (atas belanja listrik/telepon/air) hanya muncul di laporan tahunan			

TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Bandingkan Neraca Percobaan (Sakti-satker) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-satker) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	√		Sama
2. Aset Tetap	√		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	√		Sama
4. Aset Lainnya	√		Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	√		Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (Sakti) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (Sakti) dengan SIMAK	√		Sama

Semenjak menggunakan basis Akrua, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi Sakti. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. Lihat Menu Buku/Daftar- Daftar Transaksi BMN

	sama	tidak	Seharusnya
- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total Nilai Reklas Keluar?	√		Sama

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi Sakti, Laporan Buku Besar Akrua per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)		√	Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		√	Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)		√	Tidak
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)		√	Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)		√	Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"		√	Tidak
3 Kesamaan dengan BAR KPPN	√		Sama

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK Satker (Neraca Percobaan)	√		Sama

Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PMK No. 177/PMK.05/2015 ?	√		Ya
3. Apakah Format LPE telah sesuai S-5568/PB/2017 atau Surat Pedoman Penyusunan Triwulan III Komprehensif atau Surat Pedoman Penyusunan LK Tahunan? (termasuk ketentuan mengenai komparasi laporan)			
4. Apakah penjelasan LPE telah sesuai S-5568/PB/2017 atau Surat Pedoman Penyusunan Triwulan III Komprehensif atau Surat Pedoman Penyusunan LK Tahunan?			
5. Apakah penjelasan Perbedaan Saldo Awal dengan e-Rekon-LK (bila ada) sesuai S-5568/PB/2017 atau Surat Pedoman Penyusunan LK Tahunan?	√		Ya

Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya/tidak
2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak selesai?		√	Ya/tidak
3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di Pengadilan?		√	Ya/tidak
4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing Satker?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"

Perbedaan dengan e-Rekon-LK:

Contoh:

- Akun Saldo Awal Ekuitas pada LPE berbeda dengan e-Rekon-LK karena terdapat penjurnalan dengan akun 391111
- Akun Utang Pajak yang Belum Disetor berbeda dengan e-Rekon-LK karena terdapat kesalahan jurnal

Disamping hal-hal diatas, dapat juga melakukan telaah membandingkan LRA dengan Laporan Lainnya yang terkait (LO, LPE dan Neraca), misalnya:

- Beban Pegawai di LO = Realisasi Belanja Pegawai + Belanja Pegawai BLU (akun 525111) + selisih Belj Peg Yg Msh Hrs
- Beban Perjalanan Dinas di LO = Realisasi Netto akun 524xxx di LRA - selisih Piutang Pengembalian Perjadin - selisih
- Kenaikan Aset Tetap di Neraca = Realisasi Belanja Modal di LRA - transfer keluar - penghapusan + Transfer Masuk +
- dll

Mengetahui
Pejabat Penyusun Laporan Keuangan,

(SITI HALIMAH, A.Md.)

NIP. 199607312022032011

Banjarnegara, 31 Desember 2023

Penelaah,

(FATHUL YASIR FUADI, S.Kom., S.H., M.H.)

NIP. 198706222011011005